

RENCANA AKSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 (TRIWULAN I)

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender (PUG), 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 3. Memurunkan ketahanan terhadap perempuan dan anak, 4. Meningkatkan kinerja dan pelayanan OPD.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pembinaan, Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG	Jumlah Dokumen	2 Dokumen
2			Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi	Jumlah Orang	150 Orang
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)	Jumlah Laporan	Laporan	1 Laporan
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan	Laporan	1 Laporan
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Laporan	Laporan	1 Laporan
3			Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek	Jumlah Peserta	1260 Orang
4			Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	1 Dokumen

5					<p>Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kevenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Dokumen KLA</p> <p>Dokumen</p> <p>7 Dokumen</p>	<p>1 Laporan</p>	
6					<p>Perlindungan Khusus Anak</p> <p>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Peserta</p> <p>Jumlah Aktifis PATEM yang mendapat pelatihan</p>	<p>Orang</p> <p>Jumlah Aktifis</p> <p>1400 Orang</p> <p>90 Orang</p>	
7					<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Nilai AKIP</p> <p>Jumlah Laporan</p> <p>Jumlah Pegawai</p> <p>Jumlah Laporan</p> <p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</p> <p>Jumlah Laporan Pemeliharaan</p>	<p>Nilai AKIP</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>72,00</p> <p>28 Laporan</p> <p>59 Orang</p> <p>4 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>5 Laporan</p>

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Revitalisasi Regulasi/kebijakan Teknis PUG - Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan PUG - Rekomendasi APIP/Inspektorat dalam penyelenggaraan PUG - LAKIP, LKPI, LPPD	20%				50,000,000	Bidang KHP
				Mendorong POKJA PUG melakukan Analisis Gender dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan dan Tahunan	10%					Bidang KHP
				Penyusunan Rencana Aksi Tahunan POKJA PUG	20%					Bidang KHP
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	Peningkatan SDM dan Internalisasi PUG - SDM Perencanaan & Penganggaran - SDM Teknis - SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan - SDM APIP dan P2UPD - SDM Bidang Hukum - SDM Aparat Penegak Hukum - SDM Fasilitator PUG bersertifikat	25%				150,000,000	Bidang KHP
				Bintek Pendampingan PPRG dalam penyusunan program, kegiatan, dan ARG	25%					Bidang KHP

3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dan Kewenangan	25 Organisasi	Perencanaan Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada ormas tingkat kab/kota	15%	350,000,000	Bidang KHP
				Sosisiasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada ormas tingkat kab/kota	15%		Bidang KHP
				Advokasi kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi	15%		Bidang KHP
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	Bimtek dan Pendampingan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LLPPP)	0%	30,000,000	Bidang KHP
5	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Kebutuhan Spesifik	700 Orang	Penyediaan kebutuhan atau keperluan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	10%	75,000,000	UPTD PPA
6	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	150 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi perempuan korban kekerasan	15%	225,000,000	BIDANG PP

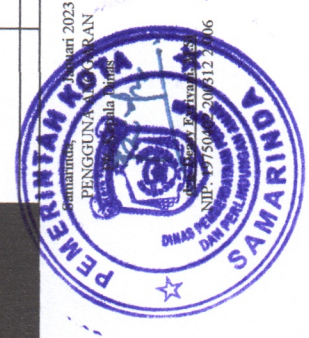
7	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan (UPTD PPA)	Jumlah Perempuan Korban Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	170 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi perempuan korban kekerasan	15%	208,320,000	UPTD PPA
				Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan	15%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan mediasi pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan	15%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan penjangkauan klien terkait kasus perempuan yang mengalami kekerasan	15%		UPTD PPA
8	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	8 Lembaga	Melakukan advokasi dan sosialisasi terhadap 8 lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (TP.PKK, PAUD, Puspaga, UPTD PPA, Poyandu Lansia, Poyandu Balita, Ketua RT, Balai Rehabilitasi Narkoba Tanah Merah)	10%	100,000,000	Bidang KHP
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan	100 Orang	Melakukan Workshop/Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan	15%	30,000,000	Bidang KHP
10	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	4 Dokumen	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Fokus Grup Diskusi (FGD) Pengumpulan, Pengolahan Data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Samarinda Tahun 2023	0%	75,000,000	Bidang PKA
				Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Focus Grup Diskusi (FGD) Analisis dan Penyajian Data Profil Gender dan Anak (SIGA) Kota Samarinda Tahun 2023	0%		Bidang PKA
				Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Kekerasan SIMFONI Untuk Operator SIMFONI Kota Samarinda Tahun 2023	0%		Bidang PKA
				Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Online Perindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kota Samarinda	0%		Bidang PKA

11	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,	30 Organisasi	Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan LP2M UNN MUL (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman) dalam pembuatan Buku/Dokumen Profil Data Gender dan Anak Kota Samarinda tahun 2023.	0%	0%	50,000,000	Bidang PHA
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	Evaluasi Kota Layak Anak, Dokumen Kelembagaan, Dokumen 5 Kluster, Dokumen Kelana dan Dekela	0%	0%	333,073,000	Bidang PHA
13	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang		0%	0%	50,000,000	Bidang PHA
14	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3 Dokumen		20%	20%	65,000,000	Bidang PHA

15	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen		20%		75,000,000	Bidang PHA
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	3 Dokumen	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	0%		50,000,000	Bidang PKA
17	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus	25%		50,000,000	UPTD PPA
				Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan	25%			UPTD PPA
				Melaksanakan layanan mediasi pada anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan	25%			UPTD PPA
				Melaksanakan layanan penjangkauan klien terkait kasus anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan	25%			UPTD PPA
				Mengedukasi klien anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan, anak yang terlantar, anak putus sekolah, dengan memberikan sosialisasi melalui buku saku	25%			UPTD PPA
18	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		10%		35,000,000	Bidang PKA
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		25%		50,000,000	Bagian Perencanaan

20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25%	30,000,000	Bagian Perencanaan
21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25%	13,850,000	Bagian Perencanaan
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	25%	5,698,425,479	Bagian Umum
23	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	25%	466,464,000	Bagian Umum
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	25%	50,000,000	Bagian Umum
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25%	6,000,000	Bagian Umum
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25%	71,150,000	Bagian Umum
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	25%	22,544,000	Bagian Umum
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25%	32,000,000	Bagian Umum
29	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu Fasilitas	1 Laporan	0%	12,000,000	Bagian Umum

30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	25%		150,000,000	Bagian Umum
31	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	25%		35,000,000	Bagian Umum
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	25%		240,000,000	Bagian Umum
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	20%		110,504,000	Bagian Umum
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	25%		150,000,000	Bagian Umum
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	25%		50,000,000	Bagian Umum
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	25%		25,000,000	Bagian Umum
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	25%		10,068,700	Bagian Umum



RENCANA AKSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 (TRIWULAN II)

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 3. Menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4. Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	<p>Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG</p> <p>Jumlah Peserta Bimtek Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi</p>	<p>Jumlah Dokumen</p> <p>Jumlah Orang</p>	<p>2 Dokumen</p> <p>150 Orang</p>
2			Perlindungan Perempuan	<p>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA)</p> <p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota</p> <p>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)</p>	<p>Jumlah Laporan</p> <p>Jumlah Laporan</p> <p>Jumlah Laporan</p>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>
3			Peningkatan Kualitas Keluarga	<p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah peserta bimtek</p>	<p>Jumlah Peserta</p>	<p>1260 Orang</p>
4			Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	<p>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah dokumen</p>	<p>Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>

5		Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	Laporan	1 Laporan
6		Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Jumlah Aktifis PATBM yang mendapat pelatihan	Orang Jumlah Aktifis	1400 Orang 90 Orang
7	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Jumlah Laporan Jumlah Pegawai Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedekakan Jumlah Laporan Pemeliharaan	Nilai AKIP Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	72,00 28 Laporan 59 Orang 4 Laporan 1 Laporan 5 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Revitalisasi Regulasi/kebijakan Teknis PUG - Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan PUG - Rekomendasi APP/Inspektorat dalam penyelenggaraan PUG - LAKIP, LKPI, LPPD	30%				50,000,000	Bidang KHP
				Mendorong POKJA PUG melakukan Analisis Gender dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan dan Tahunan	35%					Bidang KHP
				Penyusunan Rencana Aksi Tahunan POKJA PUG	35%					Bidang KHP
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	Peningkatan SDM dan Internalisasi PUG - SDM Perencana & Penganggaran - SDM Teknis - SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan - SDM APP dan P2UPD - SDM Bidang Hukum - SDM Aparat Penggak Hukum - SDM Fasilitator PUG bersertifikat	40%				150,000,000	Bidang KHP
				Bimtek Pendampingan PPRG dalam penyusunan program, kegiatan, dan ARG	40%					Bidang KHP

3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dan Kewenangan	25 Organisasi	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada ormas tingkat kab/kota	35%	350,000,000	Bidang KHP
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada ormas tingkat kab/kota Advokasi kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi Bimtek dan Pendampingan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)	35% 25% 20%	30,000,000	Bidang KHP Bidang KHP Bidang KHP
5	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	700 Orang	Penyediaan kebutuhan atau keperluan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	30%	75,000,000	UPTD PPA
6	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	150 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi perempuan korban kekerasan	30%	225,000,000	BIDANG PP

7	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan (UPTD PPA)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	170 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi perempuan korban kekerasan	30%	208.320.000	UPTD PPA
				Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan	30%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan mediasi pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan	30%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan penjangkauan klien terkait kasus perempuan yang mengalami kekerasan	30%		UPTD PPA
8	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	8 Lembaga	Melakukan advokasi dan sosialisasi terhadap 8 lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (TP, PKK, PAUD, Puspaga, UPTD PPA, Posyandu Lansia, Posyandu Balita, Ketua RT, Balai Rehabilitasi Narkoba Tanah Merah)	30%	100.000.000	Bidang KHP
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan	100 Orang	Melakukan Workshop/Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan	40%	30.000.000	Bidang KHP
10	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	4 Dokumen	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Fokus Grup Diskusi (FGD) Pengumpulan, Pengolahan Data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Samarinda Tahun 2023	25%	75.000.000	Bidang PKA
				Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Focus Grup Diskusi (FGD) Analisis dan Penyajian Data Profil Gender dan Anak (SIGA) Kota Samarinda Tahun 2023	25%		Bidang PKA
				Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Kekerasan SIMFONI Untuk Operator SIMFONI Kota Samarinda Tahun 2023	25%		Bidang PKA

											Bidang PKA	
											Bidang PKA	
											Bidang PHA	
11	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,	30 Organisasi		Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kota Samarinda Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan LP2M UNMUL (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman) dalam pembuatan Buku/Dokumen Profil Data Gender dan Anak Kota Samarinda tahun 2023. Melakukan Advokasi dan Sosialisasi Kota Layak Anak bagi Pelayanan Rumah Anak Puskesmas (PRAP)	25%						50,000,000
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen		Evaluasi Kota Layak Anak, Dokumen Kelembagaan, Dokumen 5 Kluster, Dokumen Kelima dan Deklasi	35%					Bidang PHA	333,073,000
13	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang			30%					Bidang PHA	50,000,000
14	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3 Dokumen			35%					Bidang PHA	65,000,000

15	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumentasi Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen		30%	75,000,000	Bidang PHA
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kabupaten/kota	3 Dokumen	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	35%	50,000,000	Bidang PKA
17	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus	30%	50,000,000	UPTD PPA
				Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan	45%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan mediasi pada anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan	45%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan penjangkauan klien terkait kasus anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan	45%		UPTD PPA
				Mengedukasi klien anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan, anak yang terlantar, anak putus sekolah, dengan memberikan sosialisasi melalui buku saku	45%		UPTD PPA
18	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumentasi Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		20%	35,000,000	Bidang PKA
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumentasi perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		35%	50,000,000	Bagian Perencanaan

20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	35%	30,000,000	Bagian Perencanaan
21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	35%	13,850,000	Bagian Perencanaan
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	35%	5,698,425,479	Bagian Umum
23	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	35%	466,464,000	Bagian Umum
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	35%	50,000,000	Bagian Umum
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35%	6,000,000	Bagian Umum
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35%	71,150,000	Bagian Umum
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	35%	22,544,000	Bagian Umum
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	35%	32,000,000	Bagian Umum

29	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		35%	12,000,000	Bagian Umum
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		35%	150,000,000	Bagian Umum
31	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit		35%	35,000,000	Bagian Umum
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		35%	240,000,000	Bagian Umum
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		35%	110,504,000	Bagian Umum
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		35%	150,000,000	Bagian Umum
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		35%	50,000,000	Bagian Umum
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		35%	25,000,000	Bagian Umum
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit		35%	10,068,700	Bagian Umum



RENCANA AKSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 (TRIWULAN III)

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Meningkatnya implementasi Penguatansuainan gender (PUG), 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 3. Memunahkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4. Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD.	Penguatansuainan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelaksanaan Penguatansuainan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelanggaran PUG Jumlah Peserta Bimtek Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Jumlah Orang	2 Dokumen 150 Orang
2			Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA) Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten kota	Jumlah Laporan Jumlah Laporan	Laporan Laporan	1 Laporan 1 Laporan
3			Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Jumlah peserta bimtek	Laporan Jumlah Peserta	1 Laporan 1260 Orang
4			Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	1 Dokumen
5			Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KLA Jumlah laporan	Dokumen Laporan	7 Dokumen 1 Laporan

6			Perfindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	Orang	1.400 Orang
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perfindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aktvris PATBM yang mendapat pelatihan	Jumlah Aktvris	90 Orang
7	Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan OPD		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP	72,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	28 Laporan
				Administrasi Kepegawaitan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Laporan	59 Orang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	4 Laporan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disetelakan	Laporan	1 Laporan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	Laporan	5 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengrusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Revisi/Ases Regulasi/kebijakan Teknis PUG - Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan PUG - Rekomendasi APD/Inspektorat dalam penyelenggaraan PUG - LAKIP, LKP, LPPD	60%			50,000,000	Bidang KHP	
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengrusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	Mendorong POKJA PUG melakukan Analisis Gender dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan dan Tahunan Penyusunan Rencana Aksi Tahunan POKJA PUG Peningkatan SDM dan Internalisasi PUG - SDM Perencana & Penganggaran - SDM Teknis - SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan - SDM APP dan P2UPD - SDM Bidang Hukum - SDM Aparat Penegak Hukum - SDM Fasilitator PUG bersertifikat	60%			150,000,000	Bidang KHP	
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Ekonomi Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	25 Organisasi	Bimtek Pendampingan PPRG dalam penyusunan program, kegiatan, dan ARG Pembudayaan Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada ormas tingkat kab/kota Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada ormas tingkat kab/kota Advokasi kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi	60%			350,000,000	Bidang KHP	

4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	Bimtek dan Pendampingan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)		55%	30,000,000	Bidang KHP
5	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	700 Orang	Penyediaan kebutuhan atau keperluan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus		55%	75,000,000	UPTD PPA
6	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	150 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi perempuan korban kekerasan		55%	225,000,000	BIDANG PP

7	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	170 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi perempuan korban kekerasan	75%	208,320,000	UPTD PPA
				Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan	75%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan mediasi pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan	75%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan perjangkauan klien terkait kasus perempuan yang mengalami kekerasan	75%		UPTD PPA
8	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	8 Lembaga	Melakukan advokat dan sosialisasi terhadap 8 lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (TP, PKK, PAUD, Puspaga, UPTD PPA, Posyandu Lansia, Posyandu Balita, Ketua RT, Balai Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah)	65%	100,000,000	Bidang KHP
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Melakukan Workshop/Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan	65%	30,000,000	Bidang KHP
10	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	4 Dokumen	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Fokus Grup Diskusi (FGD) Pengumpulan, Pengolahan Data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Samarinda Tahun 2023	65%	75,000,000	Bidang PKA
				Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Focus Grup Diskusi (FGD) Analisis dan Penyajian Data Profil Gender dan Anak (SIGA) Kota Samarinda Tahun 2023	65%		Bidang PKA
				Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Kekerasan SIMFONI Untuk Operator SIMFONI Kota Samarinda Tahun 2023	65%		Bidang PKA

					Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kota Samarinda	65%		Bidang PKA
					Melakukan Perjianjian Kerja Sama dengan LP2M UNMUL (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman) dalam pembuatan Buku/Dokumen Profil Data Gender dan Anak Kota Samarinda tahun 2023.	65%		Bidang PKA
11	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,	30 Organisasi		Melakukan Advokasi dan Sosialisasi Kota Layak Anak bagi Pelayanan Rumah Anak Puskesmas (PRAP)	65%	50,000,000	Bidang PHA
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen		Evaluasi Kota Layak Anak, Dokumen Kelembagaan, Dokumen 5 Kluster, Dokumen Kelana dan Delela	65%	333,073,000	Bidang PHA

13	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	110 Orang		65%	50,000,000	Bidang PHA
14	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3 Dokumen		65%	65,000,000	Bidang PHA
15	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen		65%	75,000,000	Bidang PHA
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	3 Dokumen	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	65%	50,000,000	Bidang PKA
17	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus	60%	50,000,000	UPTD PPA
				Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan	60%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan mediasi pada anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan	60%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan penjangkauan iden terkait kasus anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan	60%		UPTD PPA
				Mengedukasi klien anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan, anak yang terlanjar, anak putus sekolah, dengan memberikan sosialisasi melalui buku saku	60%		UPTD PPA

18	Pengaturan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen			50%		35,000,000	Bidang PKA
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			60%		50,000,000	Bagian Perencanaan
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			60%		30,000,000	Bagian Perencanaan
21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			60%		13,850,000	Bagian Perencanaan
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan			60%		5,698,425,479	Bagian Umum
23	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen			60%		466,464,000	Bagian Umum
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			60%		50,000,000	Bagian Umum
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			60%		6,000,000	Bagian Umum
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			60%		71,150,000	Bagian Umum

27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket		60%	22.544,000	Bagian Umum
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		60%	32.000,000	Bagian Umum
29	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan		60%	12.000,000	Bagian Umum
30	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		60%	150.000,000	Bagian Umum
31	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit		60%	35.000,000	Bagian Umum
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		60%	240.000,000	Bagian Umum
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		60%	110.504,000	Bagian Umum
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejakrya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pejakrya	13 Unit		60%	150.000,000	Bagian Umum
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	2 Unit		60%	50.000,000	Bagian Umum
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		60%	25.000,000	Bagian Umum
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit		60%	10.068,700	Bagian Umum



RENCANA AKSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 (TRIWULAN IV)

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender (PUG), 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 3. Menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4. Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG Jumlah Peserta Binnek Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Jumlah Orang	2 Dokumen 150 Orang
2			Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (DP2PA) Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Jumlah Laporan	Laporan Laporan Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
3			Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta binnek	Jumlah Peserta	1260 Orang
4			Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	1 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Revitalisasi Regulasi/kebijakan Teknis PUG - Evaluasi dan Pemantauan Penyelenggaraan PUG - Rekomendasi APP/Inspektorat dalam penyelenggaraan PUG - LAKIP, LKPI, LPPD				100%	50,000,000	Bidang KHP
				Mendorong POKJA PUG melakukan Analisis Gender dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan dan Tahunan				100%		Bidang KHP
				Penyusunan Rencana Aksi Tahunan POKJA PUG				100%		Bidang KHP
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Perangkat Daerah	Peningkatan SDM dan Internalisasi PUG - SDM Perencana & Penganggaran - SDM Teknis - SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan - SDM APIP dan P2UFD - SDM Bidang Hukum - SDM Aparat Penegak Hukum - SDM Fasilitator PUG bersertifikat				100%	150,000,000	Bidang KHP
				Bimtek Pendampingan PPRG dalam penyusunan program, kegiatan, dan ARG				100%		Bidang KHP

3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	25 Organisasi	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada ormas tingkat kab/kota	100%	350,000,000	Bidang KHP
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada ormas tingkat kab/kota	100%		Bidang KHP
				Advokasi kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi	100%		Bidang KHP
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	Bimtek dan Pendampingan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)	100%	30,000,000	Bidang KHP
5	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	700 Orang	Penyediaan kebutuhan atau keperluan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	100%	75,000,000	UPTD PPA
6	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	150 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi perempuan korban kekerasan	100%	225,000,000	BIDANG PP

7	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	170 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi perempuan korban kekerasan	100%	208,320,000	UPTD PPA
				Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan	100%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan mediasi pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan	100%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan penjangkauan klien terkait kasus perempuan yang mengalami kekerasan	100%		UPTD PPA
8	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	8 Lembaga	Melakukan advokasi dan sosialisasi terhadap 8 lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (TP PKK, PAUD, Puspaga, UPTD PPA, Posyandu Lansia, Posyandu Balita, Ketua RT, Balai Rehabilitasi Narkoba Tanah Merah)	100%	100,000,000	Bidang KHP
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Melakukan Workshop/Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan	100%	30,000,000	Bidang KHP
10	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	4 Dokumen	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Fokus Grup Diskusi (FGD) Pengumpulan, Pengolahan Data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Samarinda Tahun 2023	100%	75,000,000	Bidang PKA
				Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Fokus Grup Diskusi (FGD) Analisis dan Penyajian Data Profil Gender dan Anak (SIGA) Kota Samarinda Tahun 2023	100%		Bidang PKA
				Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Kekerasan SIMFONI Untuk Operator SIMFONI Kota Samarinda Tahun 2023	100%		Bidang PKA

				Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kota Samarinda	100%	Bidang PKA
				Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan LPZM UNMUL (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman) dalam pembuatan Buku/Dokumen Profil Data Gender dan Anak Kota Samarinda tahun 2023.	100%	Bidang PKA
11	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	Melakukan Advokasi dan Sosialisasi Kota Layak Anak bagi Pelayanan Ramah Anak Puskesmas (PRAP)	100%	Bidang PHA
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	Evaluasi Kota Layak Anak, Dokumen Kelembagaan, Dokumen 5 Kluster, Dokumen Kelana dan Dekela	100%	Bidang PHA
13	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang		100%	Bidang PHA
14	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen		100%	Bidang PHA

15	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kevenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen		100%	75,000,000	Bidang PHA
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kevenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kevenangan kabupaten/kota	3 Dokumen	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	100%	50,000,000	Bidang PKA
17	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kevenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus	100%	50,000,000	UPTD PPA
				Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan	100%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan mediasi pada anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan	100%		UPTD PPA
				Melaksanakan layanan penjangkauan klien terkait kasus anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan	100%		UPTD PPA
				Mengedukasi klien anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan, anak yang terlantar, anak putus sekolah, dengan memberikan sosialisasi melalui buku saku	100%		UPTD PPA
18	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kevenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kevenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		100%	35,000,000	Bidang PKA
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		100%	50,000,000	Bagian Perencanaan

20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		100%	30,000,000	Bagian Perencanaan
21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		100%	13,850,000	Bagian Perencanaan
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan		100%	4,797,716,135	Bagian Umum
23	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		100%	400,632,733	Bagian Umum
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		100%	50,000,000	Bagian Umum
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		100%	6,000,000	Bagian Umum
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		100%	71,150,000	Bagian Umum
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		100%	22,544,000	Bagian Umum
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		100%	32,000,000	Bagian Umum

29	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan			100%	12,000,000	Bagian Umum
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan			100%	170,000,000	Bagian Umum
31	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit			100%	85,000,000	Bagian Umum
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			100%	190,000,000	Bagian Umum
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan			100%	110,504,000	Bagian Umum
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit			100%	153,000,000	Bagian Umum
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinaannya	2 Unit			100%	69,200,000	Bagian Umum
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit			100%	28,000,000	Bagian Umum
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit			100%	210,000,000	Bagian Umum

